

Pengaruh Digitalisasi Birokrasi Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Mariana Permata Raranta¹, Sisca B. Kairupan², Devie S.R. Siwij³

¹²³Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia

mariana.raranta21@gmail.com¹, siscakairupan@unima.ac.id²,

deviesiwij@unima.ac.id³

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word: *Bureaucratic
Digitalization, ASN
Performance*

This research aims to determine the impact of bureaucratic digitalization on the performance of State Civil Apparatus (ASN) at Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. The type of research used is quantitative research, which aims to find the influence between variable X and variable Y. The data collection techniques used are observation and questionnaires. With a sample of 45 ASN (State Civil Apparatus) individuals. The data analysis techniques used include Normality Test, Linearity Test, and Hypothesis Test, namely t-test. The research results show that the bureaucratic digitalization has a significant and linear impact on the performance of ASN. From the results of data analysis and discussion from the previous chapter, this research can be concluded that the bureaucracy has an influence on the improvement of ASN performance. The simple linear regression test results show that the digitalization of bureaucracy contributed 38% to the increase in ASN performance. This figure shows that the higher the level of application of digitalization in the bureaucracy, the higher the performance of ASN in carrying out their duties in carrying out their duties. The remaining 62% is influenced other factors outside digitalization

INTISARI

Kata kunci:
Digitalisasi
Birokrasi, Kinerja
ASN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh digitalisasi birokrasi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel X (digitalisasi birokrasi) dan variabel Y (kinerja ASN). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan penyebaran kuesioner dengan jumlah sampel sebanyak 45 ASN. Teknik analisis data meliputi Uji Normalitas, Uji Linearitas, dan Uji Hipotesis menggunakan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi birokrasi berpengaruh signifikan dan linear terhadap kinerja ASN. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa implementasi digitalisasi birokrasi memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja ASN. Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa digitalisasi birokrasi memberikan kontribusi sebesar 38% terhadap peningkatan kinerja ASN. Angka ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan digitalisasi dalam birokrasi, semakin meningkat pula kinerja ASN dalam menjalankan tugasnya. Sisanya, sebesar 62%, dipengaruhi oleh faktor lain di luar digitalisasi.

I. PENDAHULUAN

Birokrasi merupakan instrumen untuk bekerjanya suatu administrasi. Dimana birokrasi bekerja berdasarkan pembagian kerja, hirarki kewenangan, impersonalitas hubungan, pengaturan perilaku, dan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan. Ada tiga masalah utama di dalam birokrasi Indonesia. Masalah pertama adalah korupsi. Permasalahan ini terjadi disemua organisasi pemerintahan. Biasanya korupsi terjadi pada tiga aktifitas utama, yaitu bidang pelayanan administrasi, pelaksanaan proyek pembangunan dan terakhir penegakan hukum. Masalah kedua dalam birokrasi di Indonesia adalah masalah efisiensi. Jumlah lembaga-lembaga pemerintahan baik di pusat dan didaerah sangat banyak, yang dampaknya memperbesar jumlah ASN yang harus mengisinya. Masalah ketiga adalah masalah efektifitas, menyangkut manfaat dari pekerja pemerintah tersebut bagi masyarakat. Maka dari itu transformasi birokrasi penting dilakukan diantaranya melalui peningkatan SDM, baik jumlah maupun kualitas tentu harus diformulasikan melalui kebutuhan proporsionalisme dan profesionalisme hal ini untuk menjawab tantangan perkembangan demokratisasi di Indonesia yang berjalan begitu cepat dan deras seiring dengan itu pula tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas, transparansi dan pemberian kecepatan pelayanan pemerintahan menjadi hal yang mutlak harus dilakukan. [1]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) digitalisasi adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Dalam pandangan para ahli, istilah digital tidak lagi hanya sekedar sebatas teknologi, melainkan juga sebuah transformasi besar yang telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. [2]

Digitalisasi birokrasi sebuah kalimat yang fenomenal dan menjadi sorotan berbagai kalangan yang pada akhirnya menjadi kata yang sering diucapkan. Yang dalam kajian ini bermaksud memperlihatkan bahwasanya peran digitalisasi memiliki power dalam menyebarluaskan dan menginformasikan berbagai informasi guna untuk mempengaruhi orang lain. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Joko Widodo, bahwa Indonesia harus melakukan transformasi digital, melompat menuju pemerintahan berbasis digital. Situasi ini merupakan sebuah tuntutan untuk dapat terus mengikuti perkembangan dunia yang terus-menerus berubah. [3]

Digitalisasi birokrasi bertujuan untuk mengurangi birokrasi manual yang sering lambat dan tidak efisien, serta menggantikannya dengan sistem digital yang memungkinkan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses. Salah satu teori utama yang mendukung konsep digitalisasi birokrasi adalah *Technology Acceptance Model (TAM)* yang dikembangkan oleh Davis (1989). *Technology Acceptance Model (TAM)* yaitu teori yang menjelaskan bagaimana pengguna menerima, memahami, dan menggunakan teknologi informasi. TAM menggunakan pendekatan teori perilaku (*behavior theory*) untuk menjelaskan proses adopsi teknologi informasi. Karena mudah digunakan dan sederhana, model ini sekarang paling banyak digunakan oleh pengguna untuk memprediksi penerimaan teknologi informasi. Teori ini digunakan untuk memprediksi tingkat penerimaan teknologi berdasarkan persepsi tentang kemudahan dan manfaat teknologi informasi. TAM menjelaskan hubungan sebab akibat antara perilaku dan keyakinan (manfaat dan kemudahan sistem informasi), tujuan, dan penggunaan sistem informasi yang sebenarnya. [4]

Di era digital ini, transformasi digital menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Digitalisasi birokrasi, sebagai salah satu wujud transformasi digital, kini menjadi fokus utama pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Seluruh kalangan masyarakat menuntut adanya pelayanan publik yang prima dari instansi pemerintahan, namun adakalanya ekspektasi masyarakat tersebut tidak terpenuhi karena dalam kenyataan yang terjadi ialah pelayanan yang rumit, berbelit-belit, mahal, lamban, dan melelahkan. Pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan semua pihak, baik masyarakat yang dilayani maupun penyelenggara pelayanan. [5]

Era digital adalah salah satu era atau zaman pada kehidupan ini telah mengalami kondisi kemajuan yang cukup pesat dan mengarah ke bentuk digital. Perkembangan era digital akan terus berjalan begitu cepat dan tak bisa dihentikan oleh manusia. Kondisi tersebut bisa terjadi karena pada dasarnya kita sebagai manusia akan selalu menuntut serta meminta agar semua hal bisa dilakukan secara efisien dan praktis. Hal ini juga akan memberikan berbagai jenis dampak, baik itu dari segi positif maupun negatif. [6]

TAM menjelaskan bahwa keputusan seseorang untuk menggunakan teknologi tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sistem itu sendiri, tetapi lebih kepada bagaimana mereka memandang manfaat teknologi tersebut (*perceived usefulness*) serta kemudahan penggunaannya (*perceived ease of use*). ASN akan lebih termotivasi untuk mengadopsi sistem digital jika mereka merasa bahwa teknologi tersebut dapat meningkatkan produktivitas kerja mereka dan tidak terlalu sulit untuk dipelajari serta dioperasikan. Namun, jika sistem yang diterapkan dianggap kompleks atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka ASN cenderung menunjukkan resistensi terhadap perubahan. Lebih jauh, pendekatan TAM juga menyoroti pentingnya sikap dan persepsi pengguna terhadap sistem digital. Jika ASN memiliki pengalaman negatif dalam menggunakan teknologi, seperti sistem yang sering mengalami gangguan, kurangnya dukungan teknis, atau kurangnya pelatihan yang memadai, maka keengganan untuk beradaptasi akan semakin besar. Oleh karena itu, selain menyediakan sistem digital yang optimal, pemerintah juga perlu memastikan adanya dukungan yang kuat dalam hal pelatihan, peningkatan kapasitas SDM, serta kebijakan yang mendorong penerimaan teknologi di lingkungan birokrasi.

Birokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Track recordnya pun tak jarang menuai kritik dari masyarakat. Namun dikutip dari perkataan Max Weber, birokrasi adalah “machine of country”, yang berarti birokrasi mempunyai peranan penting untuk mencapai tujuan bangsa. Sehingga, perkembangan teknologi digital membuat semua segi kehidupan harus mampu beradaptasi sesuai dengan tuntutan perubahan yang ada di masyarakat, yang sudah bersinggungan dengan teknologi digital menuju digitalisasi birokrasi dan demokratisasi.[7]

Dengan demikian, digitalisasi birokrasi tidak dapat hanya dilihat dari sisi kebijakan dan infrastruktur, tetapi juga dari perspektif *human-centric adoption*. ASN sebagai aktor utama dalam birokrasi perlu dipersiapkan secara menyeluruh agar tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga mampu mengoptimalkan teknologi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana implementasi digitalisasi birokrasi mempengaruhi kinerja ASN dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dijelaskan dalam TAM, sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas transformasi digital dalam birokrasi. Tuntutan akan adanya digitalisasi birokrasi di Indonesia terhadap seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota, membuat suatu daerah harus mandiri dan berpikir keras dalam menerapkan program tersebut. Prinsip dasar yang harus diingat, muara dari semua upaya digitalisasi birokrasi ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Digitalisasi Birokrasi ini dapat meningkatkan transparansi dan kemudahan Informasi publik, dalam pelayanan kepada masyarakat. Sebagai upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efektif inovatif profesional dan akuntabel Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra) sebagai salah satu unit kerja yang erat kaitannya dengan pelayanan publik, menarik untuk diteliti bagaimana digitalisasi berdampak pada kinerja aparatur sipil negaranya (ASN).

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (PPPK). Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian melalui seleksi dan tahapan yang berlaku untuk menempati suatu jabatan sesuai skil yang dimiliki, bertugas untuk melaksanakan tugas negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. [8]

Michael Armstrong, menyatakan bahwa kinerja adalah tingkat pencapaian individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas yang telah ditugaskan. Sementara Thomas W. Harrell, mengemukakan bahwa kinerja adalah kemampuan individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. [9]

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi birokrasi di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara memberikan dampak yang beragam terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Di satu sisi, digitalisasi memberikan dampak berupa peningkatan kecepatan dan efisiensi kerja, akurasi data, serta ketepatan dalam pengambilan keputusan.

Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kinerja ASN. Salah satu kendala utama adalah kurangnya literasi digital, di mana banyak ASN belum memiliki keterampilan yang memadai dalam mengoperasikan sistem digital. Minimnya pelatihan dan sosialisasi semakin memperparah kesulitan mereka dalam beradaptasi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur IT seperti perangkat keras yang tidak memadai dan koneksi internet yang lemah menghambat efektivitas digitalisasi. Akibatnya, kinerja ASN menjadi kurang optimal, lambat dalam merespons tugas, serta tidak efisien dalam menjalankan pelayanan publik secara digital. Perubahan budaya kerja juga menjadi tantangan, di mana ASN yang terbiasa dengan sistem manual cenderung mengalami resistensi terhadap teknologi baru. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sistem teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan organisasi dalam proses adaptasi tersebut. [10]

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara mulai mengadopsi digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Namun, masih perlu penelitian untuk mengetahui seberapa besar digitalisasi birokrasi mempengaruhi kinerja ASN.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh digitalisasi birokrasi terhadap kinerja ASN Biro Kesra Setda Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat atau pendorong digitalisasi birokrasi di lingkungan tersebut. Dalam hal ini Batasan masalah yang diambil yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap kinerja ASN

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki dua jenis variabel, variabel bebas yaitu X (digitalisasi birokrasi) dan variabel terikat yaitu Y (kinerja). Definisi operasional dipakai untuk mengukur kedua variabel dengan indikator yang jelas dan terukur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ASN Biro Kesra. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel dengan menjadikan semua populasi menjadi sampel. Hal ini disebabkan jumlah populasi relatif sedikit atau peneliti ingin melakukan kesalahan kecil dalam penelitiannya.

Teknik Pengumpulan Data dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada instansi yang bersangkutan dengan observasi selama kurang lebih empat bulan untuk melihat langsung kondisi *real* di lapangan dan kuesioner yang telah disusun berdasarkan indikator variabel yang akan di jawab oleh para responden melalui pendapat dan pengalaman yang mereka rasakan. Instrumen penelitian berupa mengukur variabel X dan variabel Y. Skala ini memudahkan responden dalam memberikan jawaban dan memudahkan peneliti dalam mengolah data.

Metode pengumpulan data berikut digunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi: Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang diteliti, lakukan observasi langsung di lokasi penelitian.
2. Kuesioner: Untuk mengumpulkan informasi langsung mengenai variabel penelitian. Kuesioner terdiri dari enam belas item, dan setiap pilihan jawaban diberi bobot atau skor yang disusun menurut skala Likert. [11]

Ada beberapa Uji yang digunakan yakni :

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum digunakan untuk di bagikan kepada responden, kuesioner harus melalui uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur [11], dalam hal ini hasil dari uji validitas menunjukan rhitung variable x (0.681, 0.683, 0.619, 0.780, 0.720, 0.675, 0.497, 0.265, 0.519, 0.509) dan variable y (0. 619, 0. 528, 0. 766, 0. 567, 0. 662, 0. 494) lebih besar dari pada rtabel yakni 0,294

Sedangkan uji reliabilitas memastikan konsistensi hasil jika digunakan berulang kali. Dalam hal ini Berdasarkan hasil analisis menggunakan bantuan SPSS menunjukan koefisien Variabel Digitalisasi Birokrasi sebesar 0.841 (0.841 >0,60) dengan kategori baik dimana ini berarti instrumen penelitian variabel layak dijadikan sebuah penelitian. Sementara, Variable Kinerja sebesar 0.633 (0.633 >0,60) dengan kategori baik dimana ini

berarti instrumen penelitian variabel Kinerja layak dijadikan sebuah penelitian.

2. Teknik Analisis Data

Teknik menganalisis data dilakukan menggunakan uji statistik deskriptif dan inferensial. Uji deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data, sedangkan uji inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, termasuk uji regresi linear sederhana yakni dari hasil Olah data menggunakan aplikasi spss 26. Nilai F 28.146 dan Nilai signifikan 0.000. di ketahui Nilai signifikan $0.00 < 0.05$, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Variabel atau dengan kata lain terdapat pengaruh antara Variabel X dan Y.

Uji korelasi yakni 0.620, dan uji koefisien determinasi $r^2 = 101 \times 100\% = 0,385$ maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variable x terhadap variable y sebesar 38%.

3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas dalam penelitian ini diketahui bahwa besarnya nilai Kolmogorov-smirnov sebesar 0,094 dan signifikan 0,200 ($0,200 > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal yaitu dengan hasil lebih dari 0,05 sehingga layak untuk digunakan. Uji linearitas dalam penelitian ini diketahui bahwa besarnya nilai *Deviation from Linearity* 0,068 ($0,068 > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat.

Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Sementara uji linieritas dilakukan untuk membuktikan bahwa masing-masing variabel bebas mempunyai hubungan yang linier dengan variabel terikat. [12]

4. Uji Hipotesis

Hipotesis diuji menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh signifikan antara variabel X terhadap Y. Hasil uji t menunjukkan apakah ada hubungan yang signifikan berdasarkan data yang dikumpulkan dari responden. Dari hasil perhitungan t hitung sebesar 5.305 lebih besar dari t tabel 1,681 dengan signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis dalam penelitian ini :

Ha : di terima (karena menunjukan adanya pengaruh)

Ho : di tolak

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan indikator yang dipakai dalam penelitian yaitu:

Indikator X (Digitalisasi Birokrasi)	Indikator Y (Kinerja)
1. Peningkatan efisiensi oprasional	1. Kuantitas
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik	2. Kualitas
3. Transparansi dan akuntabilitas	3. Waktu
4. Aksebilitas layanan	

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua butir kuesioner memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari r-tabel yakni 0,294 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian valid. Untuk uji reliabilitas, nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,841 untuk variabel digitalisasi birokrasi dan 0,633 untuk variabel kinerja ASN, yang berarti instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang baik.

Pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,200 ($> 0,05$), yang menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal dan dapat digunakan untuk pengujian

selanjutnya.

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat linear atau tidak. Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,068 ($> 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel digitalisasi birokrasi dan kinerja ASN.

Berdasarkan interpretasi korelasi, nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat kuat. Nilai R^2 yang diperoleh adalah 0,385 atau 38%, yang berarti bahwa variabel X mampu menjelaskan variasi dalam Y sebesar 38%. Sisanya 61,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan uji regresi linear sederhana, ditemukan bahwa digitalisasi birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja ASN Biro Kesra. Nilai nilai t-hitung sebesar 5.305 lebih besar dari t-tabel 1.681, dengan tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis alternatif (H_a) diterima, yang berarti terdapat pengaruh positif antara X dan Y.

TAM dikembangkan oleh Davis (1989) dan menjelaskan bahwa adopsi teknologi dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama: *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan). [13]

Kinerja ASN didefinisikan sebagai tingkat pencapaian tugas yang diberikan kepada pegawai dalam suatu organisasi. Menurut teori kinerja, terdapat beberapa indikator utama dalam menilai kinerja ASN, yaitu kuantitas pekerjaan, kualitas hasil kerja, serta ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas. Digitalisasi birokrasi dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja ASN dengan memberikan akses lebih cepat terhadap informasi, mengurangi birokrasi manual, dan meningkatkan fleksibilitas dalam bekerja.[14]

Berdasarkan hasil analisis data, digitalisasi birokrasi di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan dampak yang signifikan terhadap efisiensi kerja ASN. Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mempermudah administrasi dan mempercepat proses pelayanan publik. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai t-hitung sebesar 5.305 lebih besar dari t-tabel 2.016, dan Uji Koefisien Determinasi menunjukkan pengaruh variabel x terhadap y sebesar 38% yang berarti digitalisasi birokrasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja ASN.

Karena semua temuan penelitian sesuai dengan prinsip yang dijelaskan dalam teori ini, maka hipotesis penelitian terbukti benar. Digitalisasi birokrasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja ASN, baik dari aspek efisiensi, efektivitas, transparansi, maupun akuntabilitas.

Digitalisasi birokrasi memberikan berbagai manfaat terhadap peningkatan kinerja ASN. Pertama, digitalisasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian tugas, di mana proses administrasi menjadi lebih cepat dan tidak berbelit-belit. Kedua, implementasi teknologi digital memungkinkan pengelolaan data yang lebih akurat dan transparan, sehingga meminimalisir kesalahan administratif. Ketiga, keputusan dalam birokrasi dapat diambil dengan lebih cepat dan berbasis data yang valid, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keempat, digitalisasi mendorong ASN untuk lebih produktif dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sehingga meningkatkan profesionalisme dan kinerja mereka. Kinerja ASN didefinisikan sebagai tingkat pencapaian tugas yang diberikan kepada pegawai dalam suatu organisasi.

Menurut teori kinerja, terdapat beberapa indikator utama dalam menilai kinerja ASN, yaitu kuantitas pekerjaan, kualitas hasil kerja, serta ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas . [15]

Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa digitalisasi birokrasi selaras dengan teori Technology Acceptance Model (TAM), ASN menerima dan menggunakan teknologi digital sebagai bagian dari tugas mereka, yang berdampak pada peningkatan kinerja..menjalankan tugasnya.

Hasil uji korelasi juga nilai koefisien korelasi sebesar 0.620. Selain itu, uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa digitalisasi birokrasi menjelaskan 38% variasi dalam kinerja ASN. Meskipun angka ini cukup signifikan, masih terdapat faktor eksternal lain yang mempengaruhi kinerja ASN. Beberapa di antaranya mencakup infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi sistem digital, serta dukungan regulasi yang berkelanjutan.

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi birokrasi membawa manfaat yang nyata dalam meningkatkan kinerja ASN. Namun, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada adopsi teknologi semata, melainkan juga memerlukan kesiapan sumber daya manusia serta dukungan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, upaya pengembangan kapasitas ASN dalam mengadaptasi sistem digital harus terus dilakukan, termasuk melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan digital. Dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah serta dukungan kebijakan yang tepat, digitalisasi birokrasi dapat menjadi katalisator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

IV. KESIMPULAN

Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa digitalisasi birokrasi memberikan kontribusi sebesar 38% terhadap peningkatan kinerja ASN. Angka ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan digitalisasi dalam birokrasi, semakin meningkat pula kinerja ASN dalam menjalankan tugasnya. Sisanya, sebesar 62%, dipengaruhi oleh faktor lain di luar digitalisasi. Lebih lanjut, hasil uji hipotesis (uji t) mengonfirmasi bahwa implementasi digitalisasi birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja ASN. Nilai t-hitung sebesar 5.305, yang lebih besar dibandingkan t-tabel sebesar 1.681, serta nilai signifikansi sebesar 0.000, menunjukkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Artinya, ada hubungan nyata antara penerapan sistem digital dalam birokrasi dan peningkatan kinerja ASN. Dengan kata lain, semakin baik digitalisasi diterapkan, semakin efektif ASN dalam menjalankan tugasnya. Hasil uji korelasi juga nilai koefisien korelasi sebesar 0.620. Selain itu, uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa digitalisasi birokrasi menjelaskan 38% variasi dalam kinerja ASN. Meskipun angka ini cukup signifikan, masih terdapat faktor eksternal lain yang mempengaruhi kinerja ASN. Beberapa di antaranya mencakup infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi sistem digital, serta dukungan regulasi yang berkelanjutan. Dari temuan ini, berdasarkan hasil uji dapat disimpulkan bahwa digitalisasi birokrasi membawa manfaat yang nyata dalam meningkatkan kinerja ASN. Namun, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada adopsi teknologi semata, melainkan juga memerlukan kesiapan sumber daya manusia serta dukungan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, upaya pengembangan kapasitas ASN dalam mengadaptasi sistem digital harus terus dilakukan, termasuk melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan digital. Dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah serta dukungan kebijakan yang tepat, digitalisasi birokrasi dapat menjadi katalisator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

REFERENSI

- [1] T. Yuniningsih, "Kajian Birokrasi," *Defin. Manaj.*, p. 371, 2019, [Online]. Available: http://eprints.undip.ac.id/73483/1/BUKU_KAJIAN_BIROKRASI_GABUNGAN.pdf
- [2] Maharini Utami, "Digital Menurut Para Ahli: Transformasi Besar dalam Era Teknologi," Viktolia. Accessed: Aug. 04, 2024. [Online]. Available: <https://www.viktolia.id/digital-menurut-para-ahli/>
- [3] T. M. Kusmiyati Riris, Ginting Rahmanita, "DIGITALISASI BIROKRASI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (PELUANG DAN TANTANGANNYA) Riris," *KOMUNIKOLOGI Jurnal Pengemb. Ilmu Komun. dan Sos.*, vol. 7, no. 1, pp. 33–46, 2023.
- [4] D. Pibriana, "Technology Acceptance Model (TAM) untuk Menganalisis Penerimaan Pengguna Terhadap Penggunaan Aplikasi Belanja Online XYZ," *JATISI (Jurnal Tek. Inform. dan Sist. Informasi)*, vol. 7, no. 3, pp. 580–592, 2020, doi: 10.35957/jatisi.v7i3.382.

- [5] R. H. E. S. Devie S. R. Siwij, "Implementasi Aplikasi E-Kinerja di Kantor Sekretariat Daerah Kota Tomohon," *J. Adm. Kaji. Ilmu Administrasi Negara*, vol. Vol 2 No 3, p. 7, 2024, [Online]. Available: <https://ejurnal.unima.ac.id>
- [6] M. Haris, "Era Digital dan Dampak Perkembangan Teknologi yang Pesat!," *Gramedia Blog*. Gramedia Blog, 2024. [Online]. Available: <https://www.gramedia.com/literasi/era-digital/>
- [7] P. A. Noak, "Digitalisasi Birokrasi Dalam Wilayah Publik Dan Masyarakat Sipil Menyongsong Pemilu Tahun 2024," *J. Ilm. Widya Sosiopolitika*, vol. 4, no. 2, p. 132, 2022, doi: 10.24843/jiwsp.2022.v04.i02.p05.
- [8] C. Novelia Punuh, I. Pangkey, M. Si, and A. Rahman Dilapanga, "Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Utara," *J. Adm.*, vol. I, no. I, p. pp -.
- [9] Humas Seputar Birokrasi, "Peran ASN dalam Transformasi Digital di Lingkungan Pemerintahan," *Seputar Birokrasi*, 2024. [Online]. Available: <https://seputarbirokrasi.com/peran-asn-dalam-transformasi-digital-di-lingkungan-pemerintahan/>
- [10] M. R. Devie S.R.Siwij, "Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Aparatur Desa Pinasungkulan Raya Kecamatan Modinding," *J. Adm.*, vol. 3, no. 1, 2025.
- [11] H. T. Zulfikar Rizka, Sari Permata Fifian, Fatmayati Anggi, Wandini Kartika, *Teori, Metode dan Praktik Penelitian Kualitatif*, vol. 7, no. 2. Widina Media Utama, 2024.
- [12] J. Sahri, K. R. Susman, and M. I. Zulkarnain, "Uji Normalitas, Uji Linieritas dan Uji Independensi," *Univ. Negeri Padang*, pp. 1–23, 2019.
- [13] M. Riadi, "Technology Acceptance Model (TAM) - Pengertian dan Aspek," *Kajian Pustaka*. [Online]. Available: <https://www.kajianpustaka.com/2024/01/technology-acceptance-model-tam.html>
- [14] T. Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "Kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang," *J. GEEJ*, vol. 7, no. 2, pp. 19–40, 2020.
- [15] Rumawas Wehelmina, *Manajemen Kinerja*, vol. 53, no. 9. 2021.

